

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Teori Keagenan

Teori keagenan (*agency theory*) dapat dipandang sebagai model kontraktual antara dua belah pihak atau lebih, di mana salah satu pihak disebut agen dan pihak yang lain disebut prinsipal (Yushita, 2010). Di dalam teori ini terdapat pemisahan kepemilikan dan pengendalian perusahaan, perbedaan antara penyeter modal, pemisahan penanggung risiko, pembuatan keputusan dan pengendalian fungsi-fungsi dalam perusahaan (Kiryanto dan Suprianto, 2006).

Yushita (2010) menjelaskan bahwa prinsipal mendelegasikan pertanggungjawaban atas pengambilan keputusan kepada agen. Prinsipal memberikan suatu amanah kepada agen untuk melaksanakan tugas tertentu sesuai dengan kontrak kerja yang telah disepakati.

Teori keagenan mengimplikasikan adanya asimetri informasi antara manajer sebagai agen dan pemilik atau pemegang saham sebagai prinsipal (Rahmawati *et al.*, 2006). Menurut Andarini dan Januarti (2010), baik prinsipal maupun agen diasumsikan sebagai orang-orang ekonomi yang rasional dan semata-mata termotivasi oleh kepentingan pribadinya masing-masing.

Dalam Belkaoui (2004:186) dinyatakan bahwa baik prinsipal maupun agen diasumsikan untuk termotivasi hanya oleh kepentingan dirinya sendiri, yaitu untuk memaksimalkan kegunaan subjektif mereka, dan juga untuk menyadari kepentingan bersama mereka. Prinsipal berjuang untuk memaksimalkan pengembalian atas penggunaan sumber dayanya yang bergantung pada pembayaran yang terutang kepada agen, sedangkan agen berjuang untuk memaksimalkan pembayaran kontraknya yang bergantung pada suatu tingkatan usaha tertentu yang dibutuhkan.

Konflik kepentingan tersebut merupakan akibat dari asimetri informasi yang akan menimbulkan biaya keagenan, seperti biaya pengawasan, biaya obligasi, dan kerugian sisa akibat keputusan yang disfungsi (Belkaoui, 2004:189). Hal ini tentunya akan dapat menurunkan nilai perusahaan. Ahmed dan

Duellman (2007) menyatakan bahwa tingkat konservatisme yang tinggi dapat berperan dalam membantu mengurangi biaya keagenan yang timbul sebagai akibat dari asimetri informasi dalam suatu perusahaan.

2.1.2 Konservatisme Akuntansi

Konservatisme merupakan suatu aksi atau tindakan yang berhati-hati untuk mengantisipasi ketidakpastian (Raith, 2009). Prinsip konservatisme sendiri memiliki fleksibilitas yang memungkinkan manajer menggunakan berbagai metode pencatatan yang mengakui utang, beban, dan rugi lebih cepat dan mengakui pendapatan atau laba lebih lambat. Suaryana (2008) menyatakan bahwa penerapan metode akuntansi yang berbeda akan menghasilkan angka yang berbeda pula dalam laporan keuangan. Nilai atau angka yang dihasilkan dalam laporan keuangan yang konservatif cenderung akan bersifat *understatement*.

Dalam praktiknya, konservatisme mampu mengidentifikasi proyek yang memiliki *net present value* negatif maupun investasi yang memiliki kinerja buruk (Wardhani, 2008). Dengan demikian, perusahaan dapat membuat cadangan yang tepat untuk mengantisipasi potensi kerugian yang muncul sehingga meningkatkan nilai perusahaan. Selain itu, menurut Sayidah (2005), *understatement* pada laporan keuangan yang konservatif menyebabkan kerugian yang lebih kecil dibandingkan *overstatement*. Dalam Watts (2003), disebutkan bahwa laba yang dihitung dengan akuntansi konservatif dapat meningkatkan kualitas laba karena berhasil mencegah perusahaan untuk memanipulasinya.

Namun, pandangan yang berbeda mengenai konservatisme menyatakan bahwa prinsip konservatisme tidak bermanfaat bagi perusahaan. Para pengkritik konservatisme menyatakan bahwa prinsip ini menyebabkan laporan keuangan menjadi bias sehingga tidak dapat dijadikan alat oleh pengguna laporan keuangan untuk mengevaluasi risiko perusahaan (Fala, 2007). Menurut Sari (2004), ketika dalam suatu periode di mana laba atau pendapatan belum diakui, maka akan membuat pendapatan atau laba pada periode berikutnya menjadi lebih tinggi. Dengan kata lain, pendapatan atau laba tersebut menjadi tidak konservatif lagi.

Pengukuran konservatisme akuntansi memiliki beberapa metode (Sayidah, 2005) antara lain:

1. Menggunakan besarnya akrual yang diakumulasi sepanjang waktu, seperti yang dilakukan oleh Givoly dan Hayn (2000). Akrual cenderung membalik: periode yang mana *net income* melebihi (jatuh di bawah) arus kas operasi diharapkan diikuti oleh periode dengan akrual negatif (positif).
2. Berdasarkan hubungan *earning-return* seperti yang dikembangkan oleh Basu (1997). Konservatisme mempengaruhi asimetri dalam ketepatan pelaporan kejadian ekonomi dalam *earning* (*asymmetric timeliness*). *Earning* diharapkan lebih berkorelasi dengan pergerakan harga saham dalam periode *bad news* daripada *good news*. Jadi, ukuran konservatisme adalah kelebihan hubungan antara pergerakan harga saham dengan signal *earning* dalam periode *bad news* dan *good news*.
3. Berdasarkan sifat-sifat *time-series* dari *earning* dan arus kas (kecondongan dari distribusi *earning* relatif terhadap distribusi arus kas, dan variabilitas *earning* terhadap arus kas).
4. Pengukuran menurut Feltham dan Ohlson (1995). Proksi konservatif didasarkan pada definisi akuntansi konservatif berorientasi neraca. Tingkat konservatisme diproksi dengan *market-to-book ratio*. Rasio lebih dari satu menunjukkan akuntansi yang konservatif. Peningkatan dalam rasio sepanjang waktu menunjukkan peningkatan konservatisme.

Fitriany (2010) menyebutkan bahwa terdapat tiga macam metode yang dapat digunakan untuk mengukur konservatisme akuntansi model akrual. Ketiga model tersebut antara lain *accrual base* model Givoly dan Hayn (2000), model akrual Zhang (2007), dan *discretionary accrual* model Kasznik (1999). Menurut Belkaoui (2004:289), konservatisme digunakan ketika berurusan dengan ketidakpastian dalam lingkungan, terlalu optimisnya manajer serta pemilik, dan ketika melindungi kreditur terhadap distribusi yang tidak sah atas aset perusahaan sebagai dividen. Selain itu, dikatakan juga bahwa konservatisme dipandang lebih sebagai pedoman untuk diterapkan dalam situasi tertentu yang melibatkan penilaian akuntan, bukan sebagai aturan umum untuk diterapkan secara kaku dalam semua situasi.

Beberapa situasi tertentu yang dimaksud antara lain memilih estimasi umur manfaat dan nilai sisa dari aset untuk akuntansi depresiasi dan konsekuensi

aturan dari penerapan konsep *lower-of-cost-market* dalam penilaian persediaan dan efek-efek ekuitas yang dapat dijual. Penerapan konservatisme dilakukan karena situasi tersebut pada dasarnya adalah manifestasi dari intervensi akuntan yang dapat menimbulkan bias, kesalahan, distorsi, dan laporan yang merugikan para penggunanya.

2.1.3 *Corporate Governance*

Forum for Corporate Governance in Indonesia (FCGI) mendefinisikan *corporate governance* sebagai seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara pemegang saham, pengelola perusahaan, pihak kreditur, pemerintah, karyawan serta para pemegang kepentingan intern dan ekstern lainnya yang berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban mereka atau dengan kata lain suatu sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan yang bertujuan untuk menciptakan nilai tambah bagi semua pihak yang berkepentingan (*stakeholders*).

Ada dua hal yang ditekankan dalam mekanisme *corporate governance*. Pertama, pentingnya hak pemegang saham untuk memperoleh informasi dengan akurat dan tepat waktu. Kedua, kewajiban perusahaan untuk melakukan pengungkapan secara akurat, tepat waktu, dan transparan terhadap semua informasi kinerja perusahaan, kepemilikan, dan *stakeholders* (Iguna dan Herawaty, 2010).

Prinsip-prinsip internasional mengenai *corporate governance* mencakup:

1. Hak-hak para pemegang saham, yang harus diberi informasi dengan benar dan tepat pada waktunya mengenai perusahaan, dapat ikut berperan serta dalam pengambilan keputusan mengenai perubahan-perubahan yang mendasar atas perusahaan, dan turut memperoleh bagian dari keuntungan perusahaan.
2. Perlakuan sama terhadap para pemegang saham, terutama kepada pemegang saham minoritas dan pemegang saham asing, dengan keterbukaan informasi yang penting serta melarang pembagian untuk pihak sendiri dan perdagangan saham oleh orang dalam (*insider trading*).
3. Peranan pemegang saham harus diakui sebagaimana ditetapkan oleh hukum dan kerjasama yang aktif antara perusahaan serta para pemegang

kepentingan dalam menciptakan kekayaan, lapangan kerja dan perusahaan yang sehat dari aspek keuangan.

4. Pengungkapan yang akurat dan tepat pada waktunya serta transparansi mengenai semua hal yang penting bagi kinerja perusahaan, kepemilikan, serta para *stakeholders*.
5. Tanggung jawab pengurus dalam manajemen, pengawasan manajemen serta pertanggungjawaban kepada perusahaan dan para pemegang saham.

Dalam Arifin dan Rachmawati (2006), dinyatakan bahwa dengan diterapkannya mekanisme *corporate governance*, maka signal-signal yang bertujuan menginformasikan hal-hal positif tentang perusahaan akan lebih dipercaya oleh investor. Dewan komisaris dan komite audit, sebagai mekanisme *corporate governance* memiliki peran yang sangat penting dalam memelihara kredibilitas proses penyusunan laporan keuangan seperti halnya menjaga terciptanya sistem pengawasan perusahaan yang memadai serta dilaksanakannya *good corporate governance* (Wawo, 2010).

Mekanisme *corporate governance* tersebut memiliki beberapa karakteristik dengan standarnya masing-masing. Hal ini dimaksudkan untuk pencapaian utilitas secara maksimal sehingga menciptakan relevansi dan reliabilitas informasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan dengan perusahaan. Karakteristik tersebut antara lain independensi komisaris, kepemilikan dewan, dan kompetensi komite audit.

2.1.4 Independensi Komisaris

Berdasarkan Peraturan Pencatatan Efek Nomor I-A Tentang Ketentuan Umum Pencatatan Efek Bersifat Ekuitas Di Bursa, persyaratan menjadi komisaris independen adalah sebagai berikut:

1. Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan pemegang saham pengendali perusahaan tercatat yang bersangkutan.
2. Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan direktur dan/atau komisaris lainnya perusahaan tercatat yang bersangkutan.
3. Tidak bekerja rangkap sebagai direktur di perusahaan lainnya yang terafiliasi dengan perusahaan tercatat yang bersangkutan.
4. Memahami peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.

Pengertian terafiliasi adalah pihak yang memiliki hubungan bisnis dan kekeluargaan dengan pemegang saham pengendali, anggota direksi dan komisaris lain, serta dengan perusahaan itu sendiri. Utami dan Rahmawati (2008) menyatakan bahwa Keputusan Direksi Bursa Efek Jakarta (Kep-339/BEJ/07-2001) mewajibkan setiap perusahaan publik memiliki komisaris independen untuk menciptakan tata kelola perusahaan yang baik. Komisaris independen berjumlah sebanding dengan jumlah saham yang dimiliki oleh bukan pemegang saham pengendali dengan ketentuan jumlah komisaris independen sekurang-kurangnya 30% dari seluruh anggota komisaris.

Teori keagenan mendukung bahwa untuk meningkatkan independensi dewan dari manajemen, maka anggota dewan sebaiknya didominasi oleh komisaris independen (Rahman dan Ali, 2006). Wardhani (2008) menyatakan bahwa dalam menjalankan fungsinya, komisaris independen akan sangat membutuhkan informasi yang akurat dan berkualitas. Konservatisme merupakan alat yang sangat berguna bagi komisaris independen dalam menjalankan fungsi mereka sebagai pengambil keputusan dan pihak yang mengawasi manajemen. Jadi, proporsi komisaris independen dalam suatu dewan sangat mempengaruhi kualitas laporan keuangan perusahaan.

2.1.5 Kepemilikan Dewan

Kepemilikan dewan di sini memiliki pengertian yang sama dengan kepemilikan manajerial seperti yang dinyatakan oleh Utami dan Rahmawati (2008), yaitu merupakan persentase saham yang dimiliki oleh direktur dan komisaris perusahaan. Konservatisme akuntansi berperan dalam konflik kepentingan yang timbul akibat adanya asimetri informasi. LaFond dan Roychowdhury (2007) menyatakan bahwa konservatisme akuntansi berhubungan negatif dengan kepemilikan manajerial. Penelitian tersebut mengasumsikan bahwa semakin besar kepemilikan manajerial, maka manajemen semakin mengambil tindakan yang berisiko tinggi sehingga laporan keuangan yang disajikan semakin tidak konservatif. Di sisi lain, semakin rendah kepemilikan manajerial, maka masalah keagenan akan semakin besar sehingga menyebabkan permintaan atas laporan yang bersifat konservatif semakin meningkat.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Safiq (2010), ditemukan hasil bahwa konservatisme akuntansi berhubungan positif dengan kepemilikan manajerial. Hasil tersebut bertentangan dengan pernyataan Lafond dan Roychowdhury (2007) yang menemukan adanya hubungan negatif antara konservatisme akuntansi dengan kepemilikan manajerial. Perbedaan hasil tersebut kemungkinan disebabkan adanya fenomena sampel yang berbeda, yaitu kepemilikan perusahaan sampel di Indonesia berbentuk piramida, sedangkan penelitian sebelumnya struktur kepemilikannya cenderung menyebar. Safiq (2010) menyimpulkan bahwa besar kecilnya saham yang dimiliki oleh manajemen berhubungan atau dapat mempengaruhi konservatisme dalam pelaporan laporan keuangannya.

2.1.6 Kompetensi Komite Audit

Pembentukan komite audit bertujuan untuk memastikan adanya komunikasi yang berkelanjutan antara auditor eksternal dengan dewan perusahaan, di mana komite tersebut bertemu dengan para auditor secara reguler untuk meninjau kembali laporan keuangan dan proses audit, juga sistem internal akuntansi dan kontrol perusahaan (Rahman dan Ali, 2006). Pernyataan tersebut sejalan dengan Keputusan Ketua BAPEPAM Kep-29/PM/2004 Nomor IX.I.5 yang mendefinisikan komite audit adalah komite yang dibentuk oleh dewan komisaris untuk melakukan tugas pengawasan pengelolaan perusahaan.

Selain itu, Keputusan Ketua BAPEPAM juga mencantumkan persyaratan keanggotaan komite audit sebagai berikut:

1. Memiliki integritas yang tinggi, kemampuan, pengetahuan dan pengalaman yang memadai sesuai dengan latar belakang pendidikannya, serta mampu berkomunikasi dengan baik.
2. Salah seorang dari anggota komite audit memiliki latar belakang pendidikan akuntansi atau keuangan.
3. Memiliki pengetahuan yang cukup untuk membaca dan memahami laporan keuangan.
4. Memiliki pengetahuan yang memadai tentang peraturan perundangan di bidang pasar modal dan peraturan perundang-undangan terkait lainnya.

5. Bukan merupakan orang dari kantor akuntan publik, kantor konsultan hukum, atau pihak lain yang memberikan jasa audit, jasa non-audit, atau jasa konsultasi lain kepada perusahaan dalam enam bulan terakhir sebelum diangkat oleh komisaris.
6. Bukan orang yang memiliki wewenang dan tanggung jawab dalam merencanakan, memimpin, atau mengendalikan kegiatan perusahaan dalam waktu enam bulan terakhir sebelum diangkat oleh komisaris, kecuali komisaris independen.
7. Tidak memiliki saham, baik langsung maupun tidak langsung pada perusahaan terkait atau perusahaan publik.
8. Tidak memiliki hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal dengan komisaris, direksi atau pemegang saham utama perusahaan terkait atau perusahaan publik.
9. Tidak memiliki hubungan usaha, baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha perusahaan terkait atau perusahaan publik.

Bila dipandang dari aspek keuangan, maka komite audit yang kompeten dan berpengalaman sangat dibutuhkan mengingat fungsi utamanya untuk mengawasi proses pelaporan laporan keuangan dari suatu perusahaan (Rahman dan Ali, 2006).

2.1.7 Ukuran Perusahaan

Menurut Wardhani (2008), perusahaan yang memiliki ukuran besar akan menghadapi biaya politis yang lebih tinggi sehingga akan mendorong mereka untuk lebih menggunakan prinsip akuntansi yang konservatif untuk mengurangi biaya politis tersebut. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Wardhani (2008) menunjukkan bahwa ukuran perusahaan berhubungan negatif dengan tingkat konservatisme akrual perusahaan. Hasil tersebut mengindikasikan bahwa perusahaan besar akan cenderung menggunakan prinsip akuntansi yang kurang konservatif.

Hasil yang kontradiktif diperoleh dari penelitian yang dilakukan oleh Sari dan Adhariani (2010), yaitu ukuran perusahaan memiliki pengaruh positif dan

signifikan terhadap konservatisme. Hal tersebut berarti manajer pada perusahaan besar lebih menyukai untuk memilih pengurangan laba portofolio pada prosedur akuntansinya (lebih konservatif). Dengan kata lain, perusahaan besar memiliki pengungkapan yang lebih lengkap dan dapat diamati oleh auditornya dibandingkan dengan perusahaan yang kecil.

2.1.8 Leverage

Leverage adalah rasio total utang terhadap total ekuitas perusahaan (Suaryana, 2008). Ahmed dan Duellman (2007) menyatakan bahwa semakin tinggi tingkat *leverage* maka semakin besar kemungkinan konflik yang akan muncul antara pemegang saham dan pemegang obligasi yang pada akhirnya akan mempengaruhi permintaan kontraktual terhadap akuntansi yang konservatif. Pendapat tersebut serupa dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Wardhani (2008), yaitu semakin tinggi tingkat utang perusahaan maka tingkat konservatisme akuntansi dengan ukuran akrual akan semakin besar.

Hasil yang kontradiktif diperoleh dari penelitian yang dilakukan oleh Sari dan Adhariyani (2010), yaitu *leverage* berpengaruh negatif, di mana semakin tinggi *debt* terhadap total aset suatu perusahaan, maka semakin besar kemungkinan manajer perusahaan tersebut akan memilih prosedur akuntansi yang meningkatkan laba yang dilaporkan atau laporan keuangan yang disajikan cenderung tidak konservatif.

2.2 Penelitian Terdahulu

Penelitian yang dilakukan oleh Wardhani (2008) memperoleh hasil yang tidak konsisten karena setiap pengukuran konservatisme memberikan hubungan yang berbeda terhadap karakteristik dewan. Ukuran akrual memberikan hasil yaitu tidak ditemukannya pengaruh independensi komisaris dan kepemilikan dewan terhadap tingkat konservatisme. Di lain pihak, dengan menggunakan ukuran pasar, ditemukan hasil bahwa semakin tinggi tingkat proporsi komisaris independen dalam satu jajaran dewan, maka tingkat konservatisme akan semakin tinggi juga. Selain itu, terdapat pula hubungan negatif antara kepemilikan dewan dengan konservatisme akuntansi, yaitu semakin besar jumlah kepemilikan oleh dewan, maka tingkat konservatisme akan semakin rendah.

Penelitian ini merupakan hasil replikasi dari penelitian yang dilakukan oleh Wardhani (2008). Oleh karena itu, penelitian ini memiliki beberapa persamaan, di antaranya variabel dependen yang digunakan adalah konservatisme akuntansi. Persamaan kedua, mekanisme *corporate governance* yang diteliti untuk menunjukkan pengaruh terhadap konservatisme akuntansi dalam penelitian ini adalah karakteristik dewan, yaitu independensi komisaris dan kepemilikan dewan. Ketiga, penelitian ini juga menggunakan variabel kontrol, namun hanya dua variabel, yaitu ukuran perusahaan dan *leverage*. Keempat, objek penelitian yang digunakan adalah perusahaan manufaktur di Indonesia. Kelima, metode pengukuran konservatisme akuntansi juga menggunakan ukuran pasar yang merupakan nilai *market-to-book ratio* perusahaan (Beaver dan Ryan, 2000). Keenam, pengujian hipotesis menggunakan regresi berganda.

Penelitian ini memiliki beberapa perbedaan dengan penelitian yang dilakukan oleh Wardhani (2008) untuk memperoleh hasil yang bersifat lebih komprehensif dan dapat dibandingkan. Pertama, penelitian ini mengganti karakteristik keberadaan komite audit dengan kompetensi komite audit. Penggantian ini dilakukan karena kompetensi komite audit merupakan karakteristik yang lebih khusus dan diharapkan dapat memberikan pengaruh yang lebih kuat terhadap konservatisme akuntansi. Perbedaan kedua, periode penelitian sebelumnya dari tahun 2003 sampai dengan tahun 2006, sedangkan periode penelitian ini dari tahun 2007 sampai dengan tahun 2010. Ketiga, penelitian ini mengganti metode pengukuran konservatisme ukuran akrual model Givoly dan Hayn (2000) dengan ukuran akrual model Zhang (2000) karena terbukti pada penelitian sebelumnya bahwa ukuran akrual (Givoly dan Hayn, 2000) tidak memberikan pengaruh dalam hubungan independensi komisaris dan kepemilikan dewan terhadap konservatisme akuntansi. Oleh karena itu, diharapkan dengan ukuran akrual (Zhang, 2007) dapat memberikan hasil penelitian yang berbeda.

Selain menggunakan penelitian Wardhani (2008) sebagai replikasi, penelitian ini juga menggunakan dua penelitian lain sebagai acuan tambahan. Penelitian yang pertama adalah penelitian yang dilakukan oleh Ahmed dan Duellman (2007). Penelitian tersebut menggunakan tiga pengukuran konservatisme yang berbeda, yaitu ukuran pasar yang mengikuti Beaver dan Ryan

(2000), ukuran akrual yang mengikuti Givoly dan Hayn (2000), dan ukuran *asymmetric timeliness* dari *earning* yang mengikuti Basu (1997). Penelitian tersebut menyimpulkan bahwa adanya hubungan positif antara kepemilikan *outside directors* dengan konservatisme akuntansi. Di lain pihak, ditemukan adanya hubungan negatif antara persentase *inside directors* dalam dewan dengan konservatisme akuntansi. Dengan kata lain, semakin tinggi persentase komisaris terafiliasi maka tingkat konservatisme akuntansi akan semakin rendah. Secara keseluruhan, bukti yang diperoleh konsisten dengan pernyataan bahwa konservatisme akuntansi membantu dewan untuk mengurangi biaya keagenan dalam suatu perusahaan.

Persamaan dari penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Ahmed dan Duellman (2007) antara lain variabel dependen yang digunakan adalah konservatisme akuntansi. Persamaan kedua, penelitian ini juga menggunakan variabel kontrol seperti yang dilakukan oleh penelitian sebelumnya, namun hanya dua variabel kontrol, yaitu ukuran perusahaan dan *leverage*. Ketiga, penelitian ini dan penelitian sebelumnya melibatkan perusahaan manufaktur sebagai objek penelitian. Keempat, pengukuran konservatisme akuntansi menggunakan ukuran pasar (Beaver dan Ryan, 2000). Kelima, pengujian hipotesis menggunakan regresi berganda.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Ahmed dan Duellman (2007) antara lain interpretasi variabel independen yang berbeda, yaitu antara independensi komisaris (penelitian ini) dengan persentase *inside directors* (penelitian sebelumnya) dan kepemilikan dewan (penelitian ini) dengan kepemilikan *outside directors* (penelitian sebelumnya). Perbedaan interpretasi ini terjadi karena perusahaan di Indonesia menerapkan struktur dewan dengan *two tier system*, sedangkan perusahaan di Amerika menerapkan *one tier system*. Kedua, Ahmed dan Duellman (2007) tidak menggunakan ukuran akrual model Zhang (2007) untuk mengukur konservatisme akuntansi seperti halnya yang dilakukan dalam penelitian ini. Perbedaan ketiga, periode penelitian ini dilakukan dari tahun 2007 sampai dengan tahun 2010, sedangkan periode penelitian sebelumnya dilakukan dari tahun 1999 sampai dengan tahun 2001.

Penelitian kedua yang menjadi acuan adalah penelitian yang dilakukan oleh Lara *et al.* (2005). Penelitian tersebut menyatakan bahwa perusahaan yang memiliki dewan yang kuat, menunjukkan tingkat konservatisme yang lebih tinggi dibandingkan perusahaan dengan dewan yang lemah. Kualitas dewan tersebut ditentukan melalui pengukuran terhadap beberapa karakteristik dewan antara lain proporsi *non-executive directors*, proporsi *independent directors*, *CEO duality*, frekuensi pertemuan dewan, keberadaan komite audit, komite nominasi atau remunerasi, serta komite eksekutif, dan ukuran dewan. Pengukuran konservatisme yang digunakan adalah model Basu (1997) dan model Ball dan Shivakumar (2005).

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Lara *et al.* (2005) antara lain penggunaan konservatisme akuntansi sebagai variabel dependen. Persamaan kedua, penelitian ini juga menggunakan variabel kontrol seperti yang dilakukan penelitian sebelumnya, namun hanya dua variabel kontrol, yaitu ukuran perusahaan dan *leverage*. Ketiga, penelitian ini dan penelitian sebelumnya melibatkan perusahaan manufaktur sebagai objek penelitian. Keempat, pengujian hipotesis menggunakan regresi berganda.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Lara *et al.* (2005) antara lain interpretasi variabel independen yang berbeda, yaitu antara independensi komisaris (penelitian ini) dengan proporsi *directors* independen (penelitian sebelumnya). Perbedaan interpretasi ini terjadi karena perusahaan di Indonesia menerapkan struktur dewan dengan *two tier system*, sedangkan perusahaan di Spanyol menerapkan *one tier system*. Kedua, Lara *et al.* (2005) tidak menggunakan ukuran akrual model Zhang (2007) untuk mengukur konservatisme akuntansi seperti halnya yang dilakukan dalam penelitian ini. Perbedaan ketiga, periode penelitian ini dilakukan dari tahun 2007 sampai dengan tahun 2010, sedangkan periode penelitian sebelumnya dilakukan dari tahun 1997 sampai dengan tahun 2002.

Ringkasan perbandingan antara penelitian ini dengan beberapa penelitian sebelumnya dapat dilihat dalam tabel berikut ini.

Tabel 2.1 Ringkasan Perbandingan Penelitian

Pembandingan	Penelitian Ini (2011)	Wardhani (2008)	Ahmed dan Duellman (2007)	Lara <i>et al.</i> (2005)
Variabel Dependen	Konservatisme akuntansi.	Konservatisme akuntansi.	Konservatisme akuntansi.	Konservatisme akuntansi.
Variabel Independen	Independensi komisaris, kepemilikan dewan, dan kompetensi komite audit.	Independensi komisaris, kepemilikan dewan, dan keberadaan komite audit.	Persentase <i>inside directors</i> , pemisahan posisi <i>chairman</i> dan CEO, ukuran dewan, jumlah <i>directorships</i> tambahan oleh anggota dewan, dan kepemilikan <i>outside directors</i> .	Proporsi <i>non-executive directors</i> dan <i>directors</i> independen, CEO <i>duality</i> , frekuensi pertemuan dewan, keberadaan komite audit, komite nominasi atau remunerasi, serta komite eksekutif, dan ukuran dewan.
Variabel Kontrol	Ukuran perusahaan dan <i>leverage</i> .	Kepemilikan institusional, ukuran perusahaan, pertumbuhan penjualannya, profitabilitas, dan <i>leverage</i> .	Industri, ukuran perusahaan, <i>leverage</i> , kesempatan pertumbuhan kepemilikan institusional dan <i>inside directors</i> , dan karakteristik lainnya yang tidak dapat diobservasi serta bersifat stabil.	Ukuran perusahaan, kesempatan pertumbuhan, profitabilitas, <i>leverage</i> , dan perubahan kepemilikan.
Objek dan Periode Penelitian	Perusahaan manufaktur di Indonesia (2007-2010).	Perusahaan manufaktur di Indonesia (2003-2006).	Perusahaan selain jasa keuangan dan asuransi di Amerika (1999-2001).	Perusahaan selain jasa keuangan di Spanyol (1997-2002).
Pengukuran Konservatisme Akuntansi	Ukuran pasar (Beaver dan Ryan, 2000) dan ukuran aktual (Zhang, 2007).	Ukuran aktual (Givoly dan Hayn, 2000) dan ukuran pasar (Beaver dan Ryan, 2000).	Ukuran aktual (Givoly dan Hayn, 2000), ukuran pasar (Beaver dan Ryan, 2000), dan ukuran <i>asymmetric timeliness</i> (Basu, 1997).	Ukuran <i>asymmetric timeliness</i> (Basu, 1997) dan ukuran Ball dan Shivakumar (2005).
Pengujian Hipotesis	Regresi berganda.	Regresi berganda.	Regresi berganda.	Regresi berganda.

Sumber: data diolah (2011)

2.3 Pengembangan Hipotesis

Konservatisme akuntansi dapat mengantisipasi konflik kepentingan yang merupakan dampak dari asimetri informasi antara pihak agen dengan prinsipal. Prinsip konservatisme yang menekankan kehati-hatian dapat mencegah tindakan manajemen yang hendak melakukan manipulasi laba guna menghasilkan laporan keuangan yang berprospek positif di mata pemegang saham. Penerapan konservatisme akuntansi di suatu perusahaan memiliki tingkatan yang berbeda. Tingkatan tersebut dapat ditentukan dengan melihat karakteristik dari mekanisme implementasi *corporate governance* seperti independensi komisaris, kepemilikan dewan, dan kompetensi komite audit yang merupakan bentuk komitmen dari pihak internal perusahaan untuk memberikan informasi yang akurat dan transparan bagi para pihak yang memiliki kepentingan, misalnya kreditur, pemegang saham, pemerintah, maupun instansi lainnya.

2.3.1 Independensi Komisaris dan Konservatisme Akuntansi

Fungsi komisaris independen sangat dibutuhkan dalam suatu dewan untuk mengimbangi proporsi komisaris yang terafiliasi. Hal ini disebabkan karena komisaris independen diasumsikan tidak memiliki kepentingan pribadi maupun golongan sehingga pengawasan dan pengendalian berjalan dengan efektif. Wardhani (2008) mengungkapkan bahwa struktur dewan yang kuat, yang didominasi oleh komisaris independen, akan mensyaratkan informasi yang lebih berkualitas sehingga mereka akan cenderung untuk lebih menggunakan prinsip akuntansi yang lebih konservatif. Menurut Ahmed dan Duellman (2007), struktur dewan yang didominasi oleh komisaris yang terafiliasi akan memberikan kesempatan yang besar bagi pihak manajemen untuk menggunakan akuntansi yang agresif atau kurang konservatif. Berdasarkan penjelasan tersebut, maka dapat dibentuk hipotesis sebagai berikut:

H1: Independensi komisaris berpengaruh positif terhadap konservatisme akuntansi.

2.3.2 Kepemilikan Dewan dan Konservatisme Akuntansi

Dua pandangan yang berbeda terhadap besarnya jumlah kepemilikan dewan dalam suatu perusahaan, yaitu dapat berperan sebagai fungsi pengawasan

yang baik dalam proses pelaporan keuangan, dan juga dapat menjadi faktor pendorong dilakukannya kecurangan terhadap pemegang saham minoritas (Wardhani, 2008). Jadi, bila direksi dan komisaris terafiliasi menjalankan fungsi pengawasannya dengan efektif, maka prinsip yang digunakan dalam menilai laporan keuangan lebih konservatif. Namun, jika motivasi yang dilakukan dalam proses pengawasan adalah untuk merugikan pemegang saham minoritas, maka prinsip yang digunakan lebih bersifat agresif. LaFond dan Roychowdhury (2007) menyatakan bahwa perusahaan dengan tingkat kepemilikan manajerial yang rendah akan menimbulkan masalah keagenan yang semakin besar sehingga menyebabkan permintaan atas laporan yang bersifat konservatif semakin meningkat. Berdasarkan penjelasan tersebut, maka dapat dibentuk hipotesis sebagai berikut:

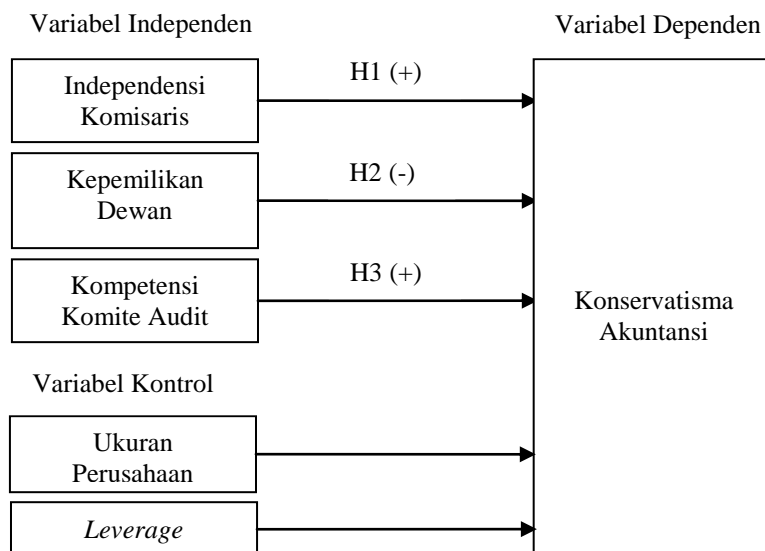
H2: Kepemilikan dewan berpengaruh negatif terhadap konservatisme akuntansi.

2.3.3 Kompetensi Komite Audit dan Konservatisme Akuntansi

Komite audit yang efektif merupakan faktor penting dalam fungsi pengawasan dan pengendalian yang kuat. Suatu komite audit yang anggotanya memiliki pengetahuan dan keahlian dalam pelaporan laporan keuangan akan dapat mencegah terjadinya tindakan oportunistik yang dilakukan oleh manajemen perusahaan (Rahman dan Ali, 2006). Abbot *et al.* (2004) menemukan bukti bahwa kecurangan dan penyajian kembali laba semakin banyak terjadi ketika anggota komite audit tidak memiliki kompetensi di bidang keuangan. Jadi, dapat dikatakan bahwa kompetensi komite audit berpengaruh negatif terhadap manajemen laba. Bila dikaitkan terhadap konservatisme akuntansi, maka anggota komite audit yang kompeten akan mampu mendeteksi adanya manajemen laba dalam penyajian laporan keuangan, sehingga laporan yang disajikan tersebut akan bersifat semakin konservatif. Dengan demikian, perumusan hipotesis dari penjelasan tersebut adalah sebagai berikut:

H3: Kompetensi komite audit berpengaruh positif terhadap konservatisme akuntansi.

2.4 Model Penelitian



Gambar 2.1 Model Penelitian

Sumber: data diolah (2011)

2.5 Bagan Alur Berpikir

